

BAB I

PENDAHULUAN

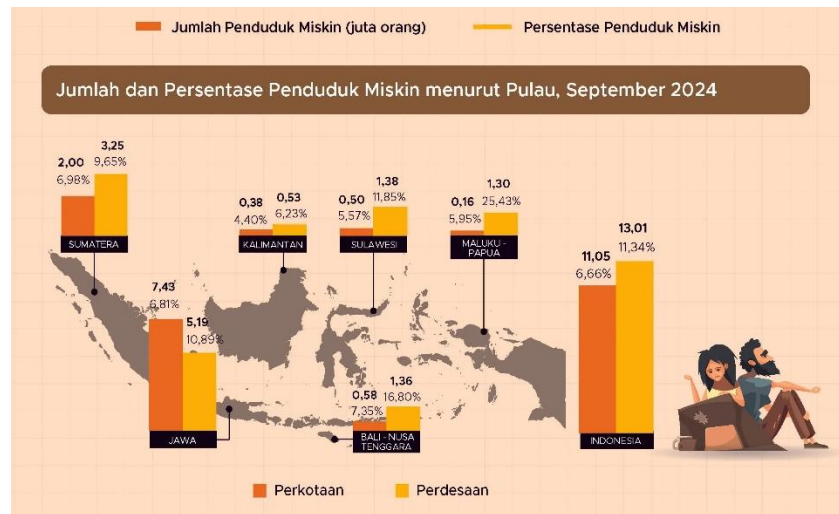
1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam konteks pembangunan nasional, kemiskinan hingga saat ini tetap menjadi isu sentral yang belum sepenuhnya teratasi. Meskipun perekonomian nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil, penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemiskinan tidak hanya merepresentasikan tingkat penghasilan yang rendah, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan serta pekerjaan yang layak. Maka dari itu, kemiskinan merupakan indikator kunci untuk menilai pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. (Moatsos & Lazopoulos, 2021).

Di Indonesia, kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan publikasi *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024* oleh Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai capaian positif terlihat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya tingkat kemiskinan, serta membaiknya kesempatan memperoleh fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan. Walaupun demikian, capaian ini belum sepenuhnya merata. Ketimpangan antar wilayah, tingginya angka ketergantungan, dan masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi rentan menjadi tantangan nyata dalam pembangunan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang pembangunan, kemiskinan dipandang sebagai fenomena multidimensi yang tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dimensi sosial. Kondisi ini terjadi ketika seseorang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan (Romzi et al., 2024). Teori pembangunan menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta distribusi pendapatan yang lebih merata merupakan prasyarat utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya dinilai dari pertumbuhan output, melainkan juga melalui efektivitasnya dalam secara bersamaan mengurangi kemiskinan, pengangguran serta ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, analisis tingkat kemiskinan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang saling berinteraksi, bukan hanya faktor pendapatan semata.

Sebagai negara dengan populasi di atas 270 juta jiwa, Indonesia sebagai negara berkembang masih bergulat dengan permasalahan kemiskinan yang cukup serius. Meskipun terdapat tren penurunan dalam tingkat kemiskinan, data menunjukkan bahwa jutaan orang masih hidup di bawah ambang garis kemiskinan. Ketidakmerataan distribusi pendapatan, kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan, serta tingginya angka pengangguran dan pekerjaan informal dengan penghasilan minim menjadi penyebab utama stagnansi kondisi ekonomi bagi sebagian masyarakat.



Gambar 1. 1 Jumlah dan Tingkat Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Pulau, September 2024

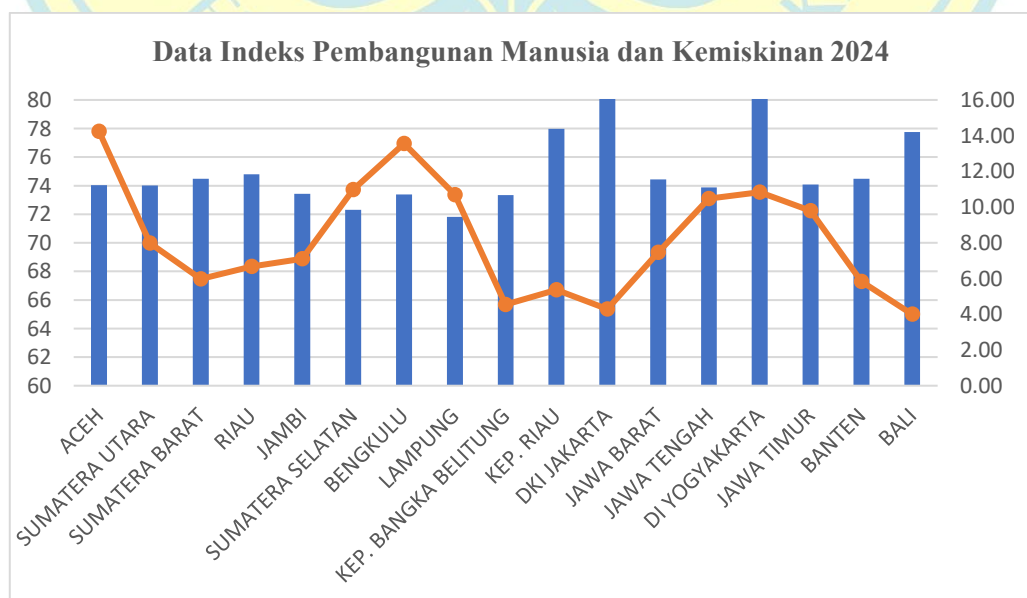
Sumber : Badan Pusat Statistik

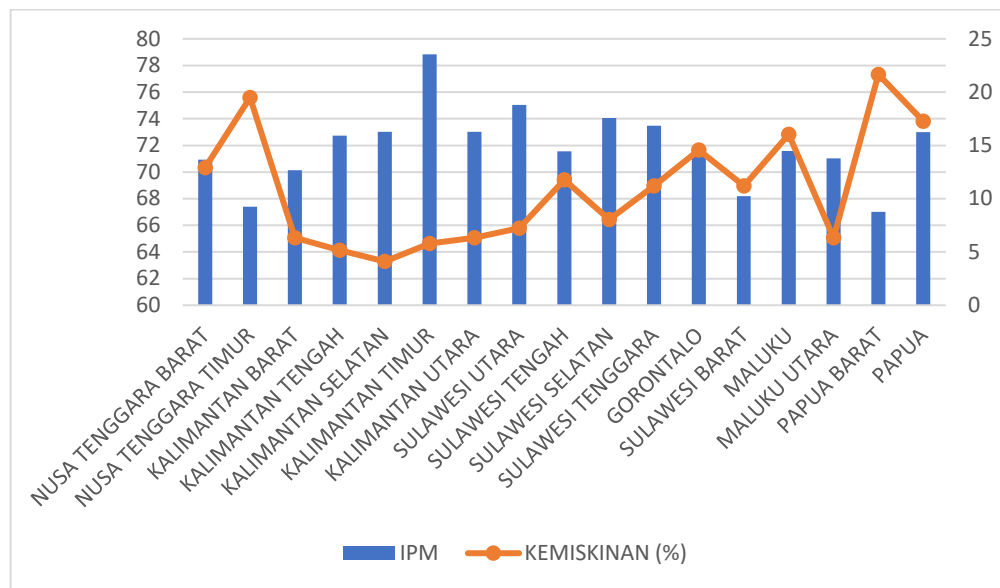
Kesenjangan yang terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data BPS per September 2024, jumlah penduduk miskin pada wilayah pedesaan mencapai 13,01 juta orang atau setara dengan 11,34% dari total penduduk, sedangkan di wilayah perkotaan hanya sebesar 6,66% atau 11,05 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang berada dalam wilayah pedesaan masih menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal mengakses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan serta infrastruktur yang memadai.

Pada provinsi Maluku dan Papua, kesenjangan ini semakin terlihat nyata, dengan tingkat kemiskinan mencapai 25,43%, setara dengan 1,3 juta orang yang mana persentase tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya. Pada sisi lain, penduduk miskin di pulau Jawa lebih banyak karena kepadatan penduduk akan tetapi persentase kemiskinan relatif lebih rendah, khususnya di perkotaan (6,81%). Berdasarkan data yang ada, permasalahan

kemiskinan di Indonesia tidak hanya berkutat pada aspek penghasilan, tetapi juga mencakup berbagai faktor lain seperti ketimpangan wilayah, keterbatasan jangkauan terhadap fasilitas publik yang memadai, dan belum meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah.

Salah satu indikator penting dalam menilai peningkatan kesejahteraan sekaligus menekan angka kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan, kesehatan serta standar hidup yang bermutu merupakan komponen utama yang tercakup dalam IPM (UNDP, 2023). Peningkatan IPM menunjukkan perbaikan mutu modal manusia yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan kinerja tenaga kerja yang diikuti dengan bertambahnya pendapatan masyarakat. Secara teoretis, pendidikan serta kesehatan yang baik pada masyarakat dapat membantu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang dengan demikian dapat terlepas dari perangkap kemiskinan. Oleh karena itu, IPM dipandang sebagai instrumen kunci pada strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.





Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik

Data yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, masih terdapat ketimpangan yang mencolok antarprovinsi terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka kemiskinan. Secara umum, Provinsi dengan IPM yang tinggi cenderung ditandai dengan tingkat kemiskinan yang rendah, sebagai terlihat pada DKI Jakarta yang memiliki IPM sebesar 83,08 dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,3 persen serta Kalimantan Timur yang memiliki IPM sebesar 78,83 dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,78 persen. Sebaliknya, Provinsi dengan IPM rendah seperti Papua Barat (67.02) dan Nusa Tenggara Timur (67.39) memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu 21.66% dan 19.48%. Angka tersebut berada jauh di atas rata-rata nasional yang menunjukkan hubungan negatif antara Indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat akan berdampak terhadap pengurangan kerentanan ekonomi.

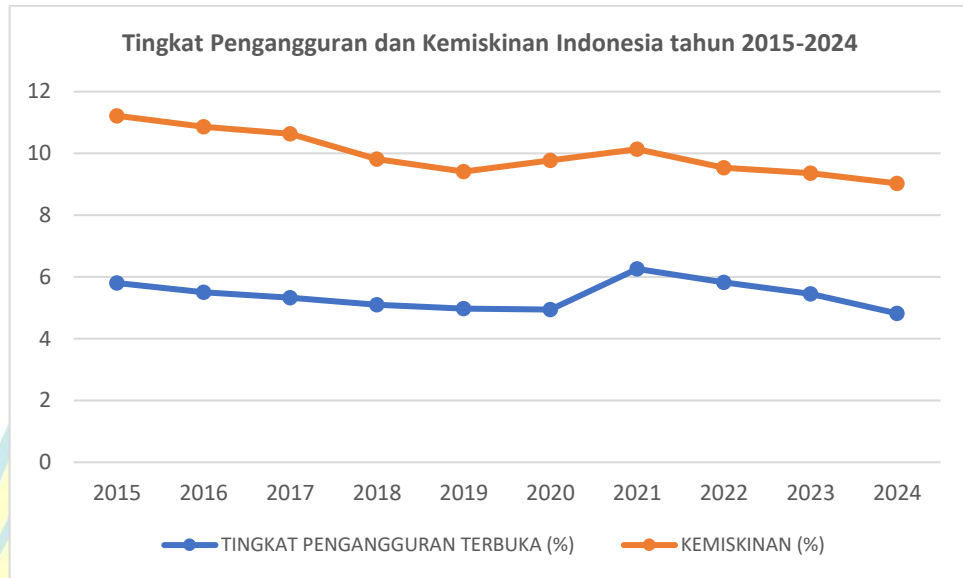
Namun, fenomena anomalistik juga ditemukan, menggambarkan bahwa tinggi nya IPM tidak selalu sejalan dengan rendahnya tingkat kemiskinan. Walaupun DIY mencapai IPM sebesar 81.55 pada tahun 2024, tingkat kemiskinan mencapai 10.83% melampaui Kalimantan Timur yang memiliki IPM lebih rendah. Keberadaan sektor pendidikan dan pariwisata sebagai sektor dominan dalam struktur ekonomi dapat berperan dalam menjelaskan terjadinya fenomena tersebut. Adanya ketimpangan pendapatan antara kelompok mapan dan pekerja informal, dan juga rendahnya upah minimum/pendapatan masyarakat terutama diluar sektor pendidikan dan pariwisata meskipun kualitas pendidikan dan kesehatan cukup baik. Maka dari itu, diperlukan kajian lebih dalam untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, tidak hanya melalui IPM, tetapi juga distribusi pendapatan serta akses pekerjaan yang layak bagi masyarakat.

Dalam IPM, aspek pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah, yang keduanya mencerminkan kualitas serta akses pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang dapat meningkatkan kemampuan individu dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, mengetahui hak-hak sosialnya dan juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Ketika individu memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak, maka mereka cenderung akan memiliki pendapatan yang sesuai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Situasi ini dapat secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan, terutama jika para pekerja menikmati jaminan sosial dan perlindungan kerja yang sesuai dengan standar layak. Hal ini

sesuai dengan penelitian Ponto (2023) bahwa pekerjaan yang layak adalah bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan dan juga merupakan salah satu kunci keberhasilan Pembangunan Keberlanjutan (TBP/SDGs). Dalam upaya mendorong kesejahteraan global, *International Labour Organisation* mengkampanyekan pentingnya pekerjaan layak guna memastikan setiap individu yang ada di seluruh dunia mempunyai akses terhadap pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup mereka.

Selain kualitas sumber daya manusia, pengangguran juga memiliki peran signifikan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. Pengangguran menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan daya serap tenaga kerja, yang secara langsung memiliki dampak pada hilangnya sumber pendapatan bagi rumah tangga. Menurut teori pasar tenaga kerja, tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan daya beli masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kerentanan ekonomi kelompok berpendapatan rendah. Sukirno (2022) menyatakan bahwa pengangguran yang berkepanjangan dapat meningkatkan kemungkinan rumah tangga untuk jatuh ke dalam kemiskinan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Pengangguran memiliki dampak buruk karena menurunnya pendapatan masyarakat dapat berdampak pada kesejahteraan yang nantinya akan menambah peluang mereka untuk terperangkap pada kondisi

miskin karena tidak memperoleh penghasilan yang memadai (Maskur et al., 2023).



Gambar 1. 3 Pengangguran dan Kemiskinan Indonesia tahun 2015 - 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik

Data pada grafik menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2024, angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia secara umum menunjukkan tren penurunan, walaupun terdapat dinamika naik turun pada waktu-waktu tertentu. Pada periode 2015–2019, kedua indikator tersebut cenderung menurun secara bertahap, yang mencerminkan adanya perbaikan kondisi perekonomian dan pasar tenaga kerja sebelum terjadinya guncangan eksternal. Pandemi COVID-19 memberikan tekanan signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pada periode 2020–2021 terjadi peningkatan angka pengangguran yang turut diikuti oleh kenaikan tingkat kemiskinan. Memasuki periode 2022-2024, grafik menunjukkan adanya pemulihan kondisi ekonomi yang ditandai dengan penurunan kembali tingkat pengangguran dan kemiskinan, walaupun penurunan kemiskinan berlangsung relatif lebih lambat.

Secara umum, grafik tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran cenderung diikuti oleh perubahan tingkat kemiskinan, sehingga kondisi pasar tenaga kerja memiliki peran yang penting dalam dinamika kemiskinan di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan berkualitas.

Faktor lain yang turut memengaruhi kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan menggambarkan ketidakseimbangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Dalam teori ekonomi pembangunan, Tingkat ketidaksetaraan yang tinggi berpotensi melemahkan peran pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan, karena hasil pertumbuhan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Stiglitz (2015) menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga memperlemah kapasitas masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang produktif. Ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk mengakses peluang dan sumber daya yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup mereka. Akibatnya, ketidaksetaraan sosial akan kian meluas dan kesejahteraan yang merata menjadi sulit tercapai. Fenomena ini berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas sosial serta menghambat efektivitas kebijakan program pengentasan kemiskinan.

Distribusi pendapatan nasional di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan, sebagaimana tercermin dari nilai Rasio Gini sebesar 0,388 pada Maret 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Tinggi nya ketimpangan pendapatan dapat memperluas jarak antar kelompok masyarakat yang dapat menyebabkan berbagai bentuk kesenjangan sosial. Masyarakat dengan penghasilan rendah menghadapi kesulitan ekonomi yang seringkali membatasi akses mereka terhadap layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Keterbatasan finansial sering kali menghambat individu dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Tinggi nya biaya pendidikan, terutama pada tingkat yang lebih tinggi dapat memperburuk kesenjangan, membuat kelompok kurang mampu semakin sulit untuk memperoleh pendidikan yang layak (Lazuardi et al., 2025). Di sisi lain, kelompok berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan ekonomi untuk dapat menikmati akses penuh terhadap pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang baik, dan tempat tinggal yang memadai.



Gambar 1. 4 Gini Ratio Indonesia tahun 2015-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tren penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam jangka panjang dapat diamati melalui grafik, meskipun fluktuasi masih terjadi pada beberapa periode. Kondisi awal pengamatan menunjukkan Rasio Gini yang relatif tinggi, yakni sekitar 0,41 pada tahun 2015, sehingga mencerminkan distribusi pendapatan yang belum merata. Pada periode 2016–2020, Gini Ratio cenderung mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai titik terkecil sekitar 0,38 di tahun 2020. Kondisi ini menandakan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan distribusi yang merata. Selanjutnya, pada periode 2021–2023 terlihat adanya kenaikan kembali nilai Gini Ratio, yang menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi pascapandemi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan. Pada tahun 2024, Gini Ratio kembali menurun, namun masih berada pada kisaran ketimpangan sedang.

Secara umum, grafik tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia bersifat persisten dan belum sepenuhnya dapat ditekan secara stabil, sehingga masih menjadi permasalahan penting dalam pembangunan ekonomi. Keadaan ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum terdistribusi secara merata pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga berpotensi memengaruhi dinamika kemiskinan.

Kondisi kemiskinan di Indonesia secara empiris masih menunjukkan tantangan yang cukup kompleks. Selama periode 2015–2024, tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung menurun, meskipun penurunannya berjalan lambat dan tidak merata antarwilayah, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik. Perbedaan tingkat kemiskinan antara kawasan perkotaan dan perdesaan masih menunjukkan

kesenjangan yang cukup besar, terutama di kawasan Indonesia Timur. Selain itu, Pandemi COVID-19 pada periode 2020–2021 memberikan tekanan signifikan terhadap pasar tenaga kerja, yang tercermin dari meningkatnya tingkat pengangguran serta kembali naiknya angka kemiskinan.

Pada saat yang sama, capaian IPM Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan kemiskinan yang signifikan di seluruh provinsi. Beberapa daerah dengan IPM relatif tinggi masih menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup besar, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas manusia belum sepenuhnya terkonversi menjadi kesejahteraan ekonomi. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari nilai Gini Ratio masih berada pada kategori sedang dan cenderung persisten, menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi belum terdistribusi secara optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah keterkaitan antara IPM, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan. Zanzibar et al., (2024) menemukan bahwa peningkatan IPM berperan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Selanjutnya, Sembiring et al., (2023) menemukan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sejalan dengan itu, Yulsa & Idris (2024) menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan berkontribusi positif terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial, baik dari sisi variabel yang digunakan maupun cakupan wilayah dan periode analisis.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan akan penelitian yang mengkaji kemiskinan secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dalam satu kerangka analisis. Penggunaan data panel seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2015–2024 menjadi penting untuk menangkap dinamika antar wilayah dan antar waktu, termasuk dampak sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19. Diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat memperkuat basis empiris serta memberikan landasan yang relevan bagi penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, menyeluruh, dan berbasis pada analisis data di konteks Indonesia. Sehingga peneliti memilih judul penelitian: **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Apakah tingkat pengangguran memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
3. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Mengkaji pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Menelaah peran ketimpangan pendapatan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

Dengan pendekatan yang diterapkan, penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan sumbangan intelektual terhadap penguatan teori dan praktik dalam ekonomi pembangunan, khususnya dalam memahami dinamika kemiskinan di negara-negara berkembang.

Manfaat Praktis :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah serta pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif terutama dalam menekan angka kemiskinan melalui perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan penyerapan tenaga kerja serta distribusi pendapatan yang lebih adil.

2. Dapat menjadi referensi dalam menyusun program sosial yang lebih tepat sasaran, yang berfokus terhadap peningkatan kualitas hidup kelompok miskin dan rentan

